

Efektivitas Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam Stabilisasi Harga Komoditas Pangan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Putri Febrianti¹, Kahar Haerah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jember

Email: ¹putrifebrian854@gmail.com, ²kaharhaerah@unmuhjember.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

11 Januari 2026

Received in revised form:

16 Februari 2026

Accepted:

13 Maret 2026

Keyword:

Policy Effectiveness, TPID, Market Operations, Price Monitoring, Price Stabilization

Kata Kunci:

Efektivitas Kebijakan, TPID, Operasi Pasar, Pemantauan Harga, Stabilisasi Harga

ABSTRACT

Price fluctuations of food commodities pose a significant challenge to regional economic stability, including in Bondowoso Regency. In 2024, the surge in prices of several strategic commodities, such as rice, cooking oil, and sugar, necessitated government intervention. This study aims to analyze the effectiveness of the Regional Inflation Control Team (TPID) policy in stabilizing food prices through market operations and price monitoring. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and official document analysis. The findings indicate that this policy has generally been effective, with indicators such as program understanding, timeliness, goal achievement, and tangible impacts showing positive results. However, challenges remain in the target accuracy indicator, where irregularities in market operation distribution occur due to weak oversight mechanisms. To enhance policy effectiveness, it is necessary to strengthen distribution monitoring, increase community participation in supervision, and improve the professionalism of officers to ensure that the policy is implemented transparently, accountably, and in a targeted manner.

ABSTRAK

Fluktuasi harga komoditas pangan menjadi tantangan utama dalam stabilitas ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2024, lonjakan harga beberapa komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula memicu perlunya intervensi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar dan pemantauan harga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara umum berjalan efektif, dengan indikator pemahaman program, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata menunjukkan hasil yang positif. Namun, tantangan masih ditemukan dalam indikator ketepatan sasaran, di mana terjadi penyimpangan dalam distribusi operasi pasar akibat lemahnya mekanisme pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan penguatan pengawasan distribusi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta profesionalisme petugas guna memastikan kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

¹ Corresponding author: putrifebrian854@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan serta menjaga stabilitas dalam berbagai sektor kehidupan (Dye, 2021). Sebagai instrumen fundamental dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan publik disusun guna merespons permasalahan spesifik, termasuk isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkembang di suatu wilayah. Pada tingkat regional, kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan lokal. Prinsip desentralisasi memberikan otonomi bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Fluktuasi harga komoditas pangan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah, karena berimplikasi langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan bahan pangan sering kali menjadi faktor utama yang memicu dinamika harga yang tidak menentu. Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia mengalami lonjakan permintaan terhadap komoditas pangan. Namun, ketika kapasitas produksi dan distribusi tidak mampu mengimbangnya, harga bahan pangan cenderung meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap laju inflasi (Chintia & Destiningsih, 2022).

Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu daerah yang bergantung pada sektor pangan juga menghadapi tantangan serupa. Pada tahun 2024, fluktuasi harga yang signifikan terjadi terutama pada komoditas seperti beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Berdasarkan data Indeks Perubahan Harga (IPH) nilai IPH di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,33%. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang signifikan, dengan puncak tertinggi pada bulan Maret dengan IPH mencapai 4,37%. Hal ini mencerminkan dinamika harga pangan yang semakin kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.

Dinamika fluktuasi harga yang signifikan ini akan berdampak pada ketahanan pangan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mayoritas pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan (Kementerian Pertanian, 2022). Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan stabilisasi harga yang tepat untuk mengatasi kegagalan pasar yang terjadi (Nugrahapsari & Hutagaol, 2021). Dalam konteks ini, setiap daerah dituntut untuk mampu menyusun strategi kebijakan yang inovatif dan adaptif agar dapat merespons dinamika pasar secara cepat dan tepat (Haerah, 2024). Mengingat fluktuasi harga komoditas pangan tidak hanya berkontribusi terhadap inflasi, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, kebijakan stabilisasi harga menjadi instrumen yang krusial dalam menjaga keseimbangan pasar.

Kebijakan stabilisasi harga pangan memiliki tiga manfaat utama yang berkontribusi terhadap keseimbangan ekonomi. Pertama, kebijakan ini berperan dalam melindungi petani sebagai produsen dari risiko penurunan harga yang dapat menghambat keberlanjutan usaha mereka, sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Kedua, kebijakan ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan mengurangi dampak negatif dari lonjakan harga pangan yang tidak terkendali. Ketiga, melalui stabilisasi harga, kondisi makroekonomi menjadi lebih terjaga, yang pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Rahmanta & Maryunianta, 2020).

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan wujud konkret dari implementasi kebijakan publik di tingkat daerah dalam menjaga stabilitas harga. Keberadaan TPID bertujuan untuk merespons tantangan inflasi yang dipicu oleh fluktuasi harga pangan, sehingga

perannya menjadi krusial dalam sistem pengendalian inflasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 500.05-8135 Tahun 2017, TPID memiliki tanggung jawab utama dalam pengumpulan data, perumusan kebijakan, penguatan sistem logistik, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan efektivitas pengendalian inflasi (Menteri Dalam Negeri, 2017). Di Kabupaten Bondowoso, TPID menjalankan fungsinya melalui koordinasi dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar kebijakan stabilisasi harga pangan dapat diimplementasikan secara optimal.

Strategi 4K menjadi pendekatan utama dalam implementasi kebijakan pengendalian harga komoditas pangan oleh TPID Kabupaten Bondowoso, yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Salah satu langkah konkret yang diterapkan adalah pemantauan harga secara berkala di berbagai pasar, baik pasar tradisional maupun pasar besar. Selain itu, TPID juga menginisiasi Operasi Pasar di titik-titik distribusi guna menstabilkan harga komoditas strategis. Program-program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga pangan, tetapi juga bertujuan untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat serta menjamin ketersediaan pasokan secara berkelanjutan.

Evaluasi efektivitas kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan oleh TPID dapat dilakukan melalui sejumlah indikator yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2007). Indikator pertama adalah pemahaman program, yang merefleksikan sejauh mana masyarakat dan pemangku kepentingan memahami kebijakan yang diterapkan. Kedua, ketepatan sasaran, yang menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Ketiga, ketepatan waktu dalam implementasi program, yang berpengaruh terhadap respons kebijakan terhadap dinamika harga. Selanjutnya, pencapaian tujuan menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan kebijakan dalam mengendalikan harga komoditas pangan. Terakhir, perubahan nyata dalam kondisi ekonomi masyarakat mencerminkan dampak konkret dari kebijakan tersebut. Melalui evaluasi terhadap indikator-indikator ini, efektivitas strategi TPID dalam menanggulangi fluktuasi harga pangan di Bondowoso dapat dianalisis secara komprehensif.

Kajian yang dilakukan oleh Shelly Vetrica (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan seperti operasi pasar, pengendalian distribusi barang, dan pengawasan harga telah terbukti efektif dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Temuan ini semakin menegaskan bahwa intervensi pemerintah melalui mekanisme tersebut berperan signifikan dalam mengendalikan harga di berbagai daerah. Namun, mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kebijakan serupa dapat diterapkan di Kabupaten Bondowoso.

Meskipun kebijakan stabilisasi harga pangan yang diterapkan oleh TPID Kabupaten Bondowoso telah menunjukkan beberapa pencapaian positif, tantangan dalam pengendalian harga masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Persistensi fluktuasi harga pangan meskipun kebijakan telah dijalankan mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program operasi pasar serta pemantauan harga sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga pangan dalam menekan volatilitas harga yang signifikan di Kabupaten Bondowoso.

METODE PENELITIAN

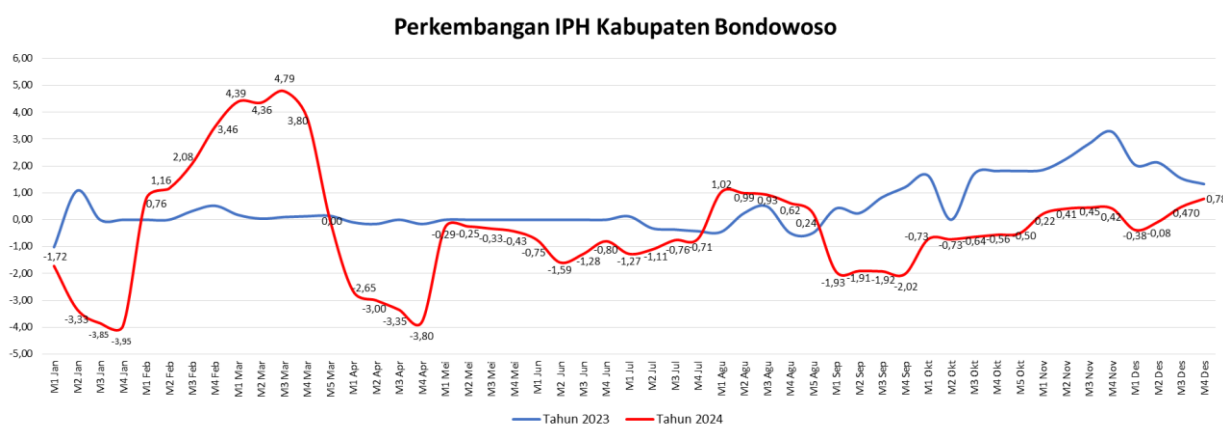
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi yang diterapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024. Subjek penelitian meliputi TPID Bondowoso, yang terdiri dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Sekretaris TPID, Kepala Bidang Perdagangan DISKOPERINDAG yang bertanggung jawab atas pengawasan distribusi dalam pelaksanaan operasi pasar dan pemantauan harga, serta Kepala Distributor Pasar Induk Bondowoso sebagai perwakilan masyarakat yang terlibat langsung dalam perputaran harga komoditas pangan di pasar.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang berperan dalam pengendalian harga pangan menjadi teknik utama dalam pengumpulan data primer, dengan menitikberatkan pada implementasi strategi, hambatan yang dihadapi, serta dampak kebijakan terhadap kestabilan harga. Selain itu, observasi nonpartisipan di pasar dilakukan untuk menganalisis dinamika harga dan mengevaluasi efektivitas intervensi TPID dalam mengendalikan inflasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi TPID, termasuk laporan perkembangan harga bahan pokok sepanjang tahun 2024 dan data Indeks Perubahan Harga (IPH).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1992) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi direduksi untuk menyaring informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi tematik guna memudahkan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan TPID dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan di Kabupaten Bondowoso.

HASIL PENELITIAN

Perkembangan harga di Kabupaten Bondowoso sepanjang tahun 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, sebagaimana tergambar dalam grafik Indeks Perubahan Harga (IPH) tahun 2024 menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 terutama pada beberapa bulan tertentu.



Berdasarkan data perkembangan IPH pada tahun 2024, terdapat pola fluktuasi harga yang mencerminkan dinamika pasar di Kabupaten Bondowoso. Pada periode Februari hingga Maret 2024, IPH mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini mulai terlihat sejak minggu pertama Februari dengan nilai 0,76, kemudian terus meningkat hingga mencapai

puncaknya pada minggu ketiga Maret dengan nilai 4,79. Tren kenaikan ini mencerminkan adanya tekanan inflasi yang cukup tinggi, yang salah satunya dipicu oleh meningkatnya permintaan bahan pangan menjelang bulan Ramadan.

Fluktuasi harga di Kabupaten Bondowoso dipengaruhi oleh kenaikan beberapa komoditas utama, yaitu beras, daging ayam, cabai rawit, cabai merah, gula, dan minyak goreng. Namun, dalam skema intervensi operasi pasar yang dilakukan oleh TPID, hanya tiga komoditas yang menjadi fokus utama, yaitu beras, minyak goreng, dan gula. Berdasarkan hasil penelitian, TPID menetapkan bahwa pemilihan komoditas dalam operasi pasar didasarkan pada karakteristik daya simpan serta urgensi kebutuhan masyarakat. Beras, minyak goreng, dan gula menjadi prioritas utama dalam intervensi karena memiliki daya simpan yang lebih lama serta berkontribusi signifikan terhadap inflasi pangan. Sementara itu, komoditas seperti cabai, daging ayam, dan bawang merah cenderung mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi akibat sifatnya yang tidak tahan lama dan dipengaruhi oleh siklus produksi.

Lonjakan IPH yang terjadi pada Februari hingga Maret 2024 merupakan bentuk *demand inflation*, di mana peningkatan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan ketersediaan stok memadai mendorong kenaikan harga komoditas. Selain faktor permintaan, spekulasi pasar juga berkontribusi terhadap peningkatan harga. Pada kondisi ini, pelaku pasar dan pedagang cenderung menaikkan harga lebih awal atau menahan stok dengan asumsi bahwa permintaan akan terus meningkat (Sahara, 2013). Perilaku *forward-looking* ini dapat memperpanjang tekanan inflasi, terutama jika tidak diimbangi dengan intervensi yang efektif. Seperti yang dikemukakan dalam teori inflasi, kombinasi antara *demand inflation* dan inflasi ekspektasi sering kali memperburuk lonjakan harga, karena keduanya saling memperkuat dampak satu sama lain.

Intervensi melalui operasi pasar oleh TPID menjadi langkah strategis dalam mengendalikan harga dengan meningkatkan pasokan di tingkat konsumen untuk meredam dampak inflasi berbasis permintaan serta mengatasi spekulasi harga. Hasilnya mulai terlihat pada akhir Maret, ditandai dengan tren penurunan IPH secara bertahap. Koreksi harga semakin signifikan pada awal April, dengan penurunan mencapai -3,80 pada minggu keempat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga dengan mekanisme operasi pasar berkontribusi dalam mengendalikan lonjakan harga.

PEMBAHASAN

Operasi pasar yang dilaksanakan oleh TPID merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi fluktuasi harga pangan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Efektivitas program ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk pemahaman pemangku kepentingan terhadap program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata yang dihasilkan. Analisis terhadap indikator-indikator ini diperlukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan operasi pasar dalam menekan volatilitas harga dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

a. Pemahaman program

Pemahaman program dalam penelitian ini merujuk pada tingkat pemahaman pemangku kepentingan terhadap program operasi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi pasar dipahami sebagai instrumen intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga komoditas strategis guna melindungi daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan musiman. Selain itu, operasi pasar juga berperan dalam menjaga ketersediaan pasokan serta memastikan harga yang wajar dan merata di berbagai wilayah.

Dari sisi pelaksana program, operasi pasar dipandang oleh TPID sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga yang terintegrasi dengan mekanisme distribusi dan pengawasan. Implementasi program ini dilakukan dengan tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan berbasis data, pengumpulan informasi harga, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Upaya ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat reaktif terhadap lonjakan harga, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menjaga keseimbangan pasar.

Di sisi lain, pelaku pasar memahami operasi pasar sebagai langkah pemerintah dalam menyediakan harga yang lebih terjangkau, terutama untuk komoditas yang pasokannya bergantung pada suplai dari luar daerah. Efektivitas program ini juga bergantung pada pemahaman yang baik dari seluruh pihak terkait, termasuk regulasi distribusi dan mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pemahaman yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, operasi pasar dapat berjalan lebih optimal dalam mencapai tujuan stabilisasi harga dan pemerataan akses pangan bagi masyarakat.

b. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran merupakan indikator untuk menilai sejauh mana program operasi pasar mampu menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini secara khusus ditargetkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh lonjakan harga. Intervensi ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan memastikan kelompok rentan tetap memiliki akses terhadap bahan pangan. Selain menargetkan masyarakat, operasi pasar juga mencakup aktor-aktor distribusi seperti Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Pangan Kita (TPK), yang berperan dalam menyalurkan bahan pangan dengan harga stabil. Program ini diterapkan tidak hanya di pasar-pasar utama tetapi juga di 23 kecamatan dengan titik distribusi di masing-masing dua desa. Cakupan yang luas ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses antarwilayah dan memastikan pemerataan pasokan di daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan.

Mekanisme distribusi dalam operasi pasar menggunakan sistem pembatasan pembelian dengan satu KTP untuk satu paket sembako guna memastikan bantuan tepat sasaran. Selain itu, proses verifikasi dilakukan terhadap RPK dan TPK melalui persyaratan administrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini diterapkan sebagai upaya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan distribusi oleh pihak yang tidak berhak.

Namun, meskipun program ini telah menasar kelompok yang membutuhkan, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait kemungkinan penyalahgunaan oleh pedagang yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan pembelian guna mencegah spekulasi harga dan memastikan bahwa program benar-benar menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

c. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan operasi pasar berperan krusial dalam meminimalkan dampak negatif akibat fluktuasi harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi pasar umumnya dilaksanakan menjelang Ramadhan, ketika harga pangan cenderung meningkat akibat lonjakan permintaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program telah mempertimbangkan tren konsumsi masyarakat, sehingga intervensi dilakukan pada periode yang krusial untuk menekan kenaikan harga sebelum berdampak lebih luas pada daya beli masyarakat.

Selain intervensi yang bersifat musiman, TPID juga mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk operasi pasar tahunan dan bekerja sama dengan BULOG untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Dengan adanya cadangan tersebut, operasi pasar dapat dilakukan secara fleksibel di luar periode yang telah direncanakan, terutama ketika terjadi lonjakan harga di luar siklus tahunan.

Dari aspek implementasi, operasi pasar terbagi menjadi dua skema, yaitu pelaksanaan rutin mingguan di pasar-pasar dan pelaksanaan situasional di kecamatan yang mengalami lonjakan harga signifikan. Cakupan program ini mencakup 23 kecamatan dengan masing-masing dua desa sebagai titik distribusi utama. Pola distribusi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menjangkau wilayah yang membutuhkan stabilisasi harga secara cepat dan tepat.

d. Tercapainya tujuan

Keberhasilan operasi pasar yang diterapkan oleh TPID dapat diukur melalui tercapainya tujuan sebagai indikator utama efektivitas program. Efektivitas sendiri didefinisikan sebagai sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, operasi pasar dikatakan efektif apabila mampu menjaga stabilitas harga komoditas pangan di Kabupaten Bondowoso dalam batas yang wajar. Dengan demikian, efektivitas operasi pasar dapat dinilai dari kesesuaian antara hasil yang dicapai (*actual outcome*) dengan hasil yang diharapkan (*expected outcome*) (Anis, Usman, & Arfah, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi pasar terbukti efektif dalam mencapai tujuan stabilisasi harga komoditas pangan melalui mekanisme subsidi pada komoditas strategis, seperti beras, gula, dan minyak goreng. Kebijakan ini memungkinkan harga jual tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun terjadi lonjakan harga akibat faktor musiman maupun gangguan pasokan. Keberhasilan program ini juga didukung oleh koordinasi yang baik antara TPID, DISKOPERINDAG, dan BULOG dalam memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar.

Keberhasilan operasi pasar dalam menjaga stabilitas harga juga tercermin dari keterkendalian tingkat inflasi daerah. Dengan adanya intervensi harga yang tepat, kenaikan harga yang signifikan dapat ditekan sehingga tidak memberikan dampak yang luas terhadap daya beli masyarakat. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam efektivitas program ini, terutama dalam memastikan pasokan pangan tersedia dan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah.

e. Perubahan nyata

Perubahan nyata merupakan indikator yang mengukur dampak langsung dari implementasi operasi pasar terhadap aksesibilitas bahan pangan, stabilitas harga, dan keseimbangan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi pasar meningkatkan daya beli masyarakat dengan menyediakan harga bahan pangan yang lebih terjangkau. Selain itu, stabilitas harga yang terjaga turut berkontribusi dalam menjaga inflasi daerah tetap terkendali.

Dari sisi ekonomi, operasi pasar mendorong kelancaran distribusi barang dan memastikan ketersediaan pasokan, sehingga pedagang tetap dapat menjalankan usaha mereka tanpa tekanan akibat fluktuasi harga yang ekstrem. Dengan stabilitas harga yang lebih baik, masyarakat dapat mengalokasikan pendapatannya secara lebih seimbang tanpa terbebani oleh lonjakan harga kebutuhan pokok.

Secara keseluruhan, operasi pasar memberikan manfaat nyata dengan memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta berkontribusi terhadap keseimbangan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan kelancaran distribusi bahan pangan. Namun, di satu sisi efektivitas operasi pasar juga tidak dapat dilepaskan dari sistem pemantauan harga yang dilakukan secara berkala. Pemantauan harga menjadi elemen penting dalam memastikan intervensi pasar dilakukan secara tepat waktu dan berbasis pada kondisi harga aktual di lapangan. Pemantauan ini dilakukan secara berkala di pasar-pasar utama untuk memperoleh data harga komoditas secara *real-time*, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah intervensi kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan operasi pasar.

Pemantauan harga yang dilakukan oleh TPID memiliki beberapa peran strategis dalam mendukung efektivitas operasi pasar. Pertama, pemantauan harga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap lonjakan harga. Dengan adanya pencatatan harga harian, TPID dapat mengidentifikasi pola fluktuasi harga dan menentukan titik-titik rawan inflasi. Ketika ditemukan indikasi kenaikan harga yang signifikan pada komoditas tertentu, TPID dapat segera mengambil langkah intervensi seperti mempercepat pelaksanaan operasi pasar atau meningkatkan pasokan dari daerah lain.

Kedua, pemantauan harga memungkinkan pengambilan kebijakan berbasis data. Data harga yang dikumpulkan dan diinput ke dalam sistem pemantauan, seperti SISKAPERBAPO, menjadi landasan dalam menyusun strategi stabilisasi harga. Dengan informasi yang akurat dan terkini, TPID dapat menentukan komoditas mana yang perlu diintervensi serta menyesuaikan volume dan distribusi operasi pasar agar lebih tepat sasaran.

Ketiga, pemantauan harga membantu dalam koordinasi antar pemangku kepentingan. Data yang diperoleh dari pemantauan harga tidak hanya digunakan oleh TPID tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, distributor, dan instansi terkait, seperti BULOG dan DISKOPERINDAG. Dengan adanya koordinasi yang berbasis data pemantauan, kebijakan stabilisasi harga dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Keempat, pemantauan harga berperan dalam mencegah spekulasi pasar. Dalam kondisi tertentu, lonjakan harga tidak hanya disebabkan oleh faktor permintaan dan pasokan, tetapi juga oleh praktik spekulatif yang dilakukan oleh pedagang atau distributor. Dengan pemantauan harga yang ketat, TPID dapat mengidentifikasi pola kenaikan harga yang tidak wajar dan segera mengambil tindakan preventif, seperti meningkatkan pengawasan distribusi atau mempercepat intervensi melalui operasi pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemantauan harga dan operasi pasar telah berkontribusi pada stabilisasi harga pangan di Kabupaten Bondowoso. Dengan adanya sistem pemantauan yang berjalan secara konsisten, TPID dapat memastikan bahwa operasi pasar tidak hanya bersifat reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan yang lebih proaktif dalam mengendalikan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan stabilisasi harga pangan yang diterapkan oleh TPID Kabupaten Bondowoso melalui mekanisme operasi pasar dan pemantauan harga telah berjalan secara efektif dalam stabilisasi harga pangan tahun 2024. Sinergi antara kedua program ini memastikan bahwa kebijakan stabilisasi harga tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dengan menjaga ketersediaan stok pangan dan mengendalikan lonjakan harga.

Meskipun kebijakan ini secara umum dapat dikategorikan efektif, tantangan dalam indikator ketepatan sasaran masih menjadi kendala khususnya dalam distribusi operasi pasar yang belum sepenuhnya tepat. Penyimpangan dalam implementasi disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan, yang memungkinkan pihak-pihak tertentu memperoleh bahan pangan bersubsidi dalam jumlah besar secara tidak semestinya. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas intervensi dan menghambat tujuan utama kebijakan dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jika tidak segera diperbaiki, ketidaktepatan distribusi ini dapat menurunkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan serta memperbesar ketimpangan akses terhadap bahan pangan bersubsidi.

Untuk mengatasi tantangan dalam ketepatan sasaran distribusi operasi pasar, diperlukan penguatan pengawasan melalui kontrol langsung oleh petugas, pembatasan jumlah pembelian yang lebih disiplin, serta penggunaan kupon sederhana bagi kelompok sasaran guna memastikan distribusi yang lebih tepat. Mekanisme pengawasan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses agar setiap indikasi penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti. Peningkatan profesionalisme petugas menjadi aspek krusial yang dapat dilakukan melalui pelatihan berkala, evaluasi kinerja, serta penerapan standar etika dalam pengambilan keputusan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi publik*, 1104-1116.
- Chintia, R. A., & Destiningsih, R. (2022). Pengaruh Harga Komoditas Pangan terhadap Inflasi di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 244-258.
- Dye, T. R. (2021). *Understanding Public Policy* (15 ed.). Florida: Pearson Education.
- Haerah, K. (2024). Review of Human Resource Management in the Field of Public Management and Public Administration. *Advances in Social Humanities Research*, 924-933.
- Kementerian Pertanian. (2022). *Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2022*. Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Menteri Dalam Negeri. (2017, Oktober 4). *Kepmendagri tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah*. Retrieved November 6, 2024, from TPIN: [https://tpin.id/wp-content/uploads/TPIN/Publikasi/Legacy/Kepmendagri%20tentang%20TPID%20\(2017\).pdf](https://tpin.id/wp-content/uploads/TPIN/Publikasi/Legacy/Kepmendagri%20tentang%20TPID%20(2017).pdf)
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nugrahapsari, R. A., & Hutagaol, M. P. (2021). The Critical Review of Unhulled Rice and Rice Price Policy in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 11-26.
- Rahmanta, & Maryunianta, Y. (2020). Pengaruh Harga Komoditi Pangan Terhadap Inflasi di Kota Medan. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)*, 35-44.
- Sahara, A. Y. (2013). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 149-157.
- Sutrisno, E. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Vetria, S. (2024). Optimalisasi Peran Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) dalam Penanggulangan Inflasi di Kota Palembang. *Journal of Mandalika Social Science*, 43-52.